

Peluncuran Sustainable Spices Initiative Indonesia: Wadah Strategis bagi Terwujudnya Sektor Rempah Berkelanjutan di Indonesia



Sebuah wadah untuk sektor rempah berkelanjutan di Indonesia bernama Sustainable Spices Initiative Indonesia (SSI-I) diluncurkan secara resmi, Kamis (29/4). SSI Indonesia akan menjadi wadah strategis bagi para pemangku kepentingan di bidang rempah-rempah untuk menyalurkan beragam inisiatif guna memastikan terwujudnya sektor rempah berkelanjutan di Indonesia.

Dalam sambutannya, Deputi 2 Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud, menyampaikan dukungannya terhadap lahirnya SSI Indonesia yang terhubung langsung dengan SSI di tingkat global.

“Kami harap wadah ini bisa memunculkan berbagai inisiatif baru yang dapat berkontribusi pada peningkatan sektor pangan dan agribisnis. Utamanya untuk pemberdayaan petani kecil dan meningkatkan akses peluang pasar yang berdampak positif pada kehidupan petani dan lingkungan,” kata Musdhalifah.

Selanjutnya, komitmen Pemerintah untuk mewujudkan rempah-rempah berkelanjutan di Indonesia diwujudkan secara nyata dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan SSI Indonesia tentang “Pengembangan Komoditas Rempah dan Tanaman Obat Secara Berkelanjutan dalam Mendukung Ekspor” yang telah dilakukan pada 23 Maret 2021 lalu.

“Saya berharap implementasi kerjasama yang mengacu pada nota kesepahaman ini dapat meningkatkan volume serta nilai ekspor komoditas rempah dan tanaman obat di Indonesia di pasar internasional,” jelas Direktur Tanaman Semusim dan Rempah Kementerian Pertanian Hendratmojo Bagus Hudoro.

Platform nasional sektor rempah di beberapa negara telah berhasil membuktikan kemitraan yang kuat untuk menyelaraskan penyelesaian berbagai masalah di sektor ini. Selain itu, sudah saatnya pelaku sektor rempah-rempah menjadikan ‘kelestarian lingkungan’ sebagai strategi jangka panjang.

“Pembentukan wadah ini tidak hanya untuk mengamankan ketersediaan produk yang cukup di masa mendatang, tetapi juga menyadari bahwa sebagai masyarakat global akan saling terhubung satu dengan lainnya. Penyelesaian permasalahan seperti rendahnya pendapatan petani, dampak perubahan iklim, minimnya inovasi praktik bertani, dan permasalahan lainnya harus diselesaikan bersama-sama. Dengan kata lain, bisnis di sektor rempah akan berhasil jika dilakukan secara inklusif dan bertanggung jawab,” tutur Ketua Sustainable Spices Initiative Global Alfons Van Gulick.

Adapun pembentukan SSI Indonesia didasari oleh pentingnya suatu kolaborasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan di sektor rempah-rempah di Indonesia. Permasalahan tersebut diantaranya adalah kurangnya fasilitas dan alat untuk bertani yang lebih baik, adanya hama dan penyakit, dampak akibat perubahan iklim, pengetahuan petani yang minim tentang praktik baik budidaya rempah, tuntutan pasar global untuk rempah-rempah yang berkelanjutan, hingga berkurangnya jumlah petani karena profesi ini belum bisa menunjang kesejahteraan yang lebih baik.

Ketua SSI Indonesia Dippos Naloanro Simanjuntak menambahkan bahwa ke depannya peluang pasar internasional untuk rempah yang berkelanjutan sangat terbuka untuk Indonesia.

“Selain tujuan ekonomi, SSI Indonesia ingin agar sektor rempah dapat memberikan dampak keberlanjutan bagi kehidupan sosial, lingkungan dan tata kelola. Ini sangat sejalan dengan tujuan pembangunan

berkelanjutan yang menjadi agenda PBB,” kata Dippos.

“Untuk mengimplementasikan peta jalan SSI Indonesia di lima tahun ke depan, tentunya SSI Indonesia memerlukan dukungan dari semua pihak, khususnya pemerintah, sektor swasta, NGO, mitra pembangunan, akademisi, lembaga penelitian dan juga organisasi atau komunitas petani. Kami percaya kolaborasi tersebut adalah kunci untuk dimulainya perjalanan menuju sektor rempah berkelanjutan di Indonesia,” tambah Dippos.

Sebagai informasi, terdapat lima isu prioritas yang menjadi perhatian SSI Indonesia yaitu, 1) peningkatan pendapatan petani, 2) peningkatan good agricultural practices, 3) terciptanya model perdagangan yang adil dan menguntungkan petani, 4) memastikan implementasi kebijakan pertanian berkelanjutan dengan dukungan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya, serta 5) peningkatan layanan laboratorium. (dep2/ltg/fsr/hls)
